

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Prosedur Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada DPRD Sumatera Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Anggaran

Implementasi anggaran merupakan penerapan dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran, suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik, ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat ditetapkan secara tepat, dana yang diterima sebagai belanja oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali telah ditentukan berdasarkan peraturan dan per undang-undang.

2. Prosedur perencanaan anggaran meliputi:

- a. Penyusunan nota kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi tahun 2022

Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap KUA dan PPAS yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara SKPD, Plafon Anggaran

Sumatera Barat telah memiliki standar biaya yang jelas untuk melakukan penyerapan anggaran dan realisasi belanja seperti yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut. Sehingga implementasi anggaran dengan realisasi anggaran tersebut mencapai lebih dari 86%.

3. Permasalahan yang timbul dalam Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Permasalahan yang timbul dalam implementasi anggaran berbasis kinerja yang utama sekali adalah data dari kegiatan yang akan dilaksanakan, data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Faktor politis yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan politik yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan yang biasanya datang dari adanya tarik menarik kepentingan diantara elit politik dan politik penguasa dalam mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, lalu tidak adanya standarisasi pengukuran kinerja secara seragam yang membuat penilaian keberhasilan perdepartemen juga tidak seragam. Tidak jelasnya tujuan dan indikator kinerja, indikator kinerja yang kadang kurang spesifik dan kurang terukur. Kurangnya fasilitas dan sistem pendukung yang dimiliki pemerintah daerah untuk menunjang kinerja yang berkaitan dengan penganggaran.

4. Solusi Yang Dapat Dilakukan Dalam Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

akan dicek dari awal sampai akhir untuk mengurangi waktu yang terbuang, menghindari lembur yang akan mengakibatkan kurang efisiennya pekerjaan di kemudian hari.

3. Kepala Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan, dan Verifikasi menginformasikan satu bulan sebelum pemeriksaan, informasi yang akan dikumpulkan harus sudah ada di tangan kepala sub unit satu bulan sebelum pemeriksaan untuk menghindari pekerjaan mendesak yang nantinya akan menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaannya

